



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN LOKAL DI PROVINSI LAMPUNG

Bernadeta Bias Pertiwi¹, Fatma Arabel Keisya², Vincensius Soma Ferrer³

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Email: bernadetiabiasp@gmail.com¹, fatmaarabel77@gmail.com^{2*},
vsomaferrer@fisip.unila.ac.id³

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) is an important instrument in promoting village economic independence through the utilization of local potential. This study aims to analyze the role of the Lampung Province Community Empowerment, Village, and Transmigration Office in strengthening Advanced BUMDes to stimulate the local economy. The study used a qualitative descriptive approach utilizing data from documents, regulations, and interview results. The results show that the PMDT Office plays a role as a facilitator and regulator through the Advanced BUMDes Program, which is integrated into the My Advanced Village program. Strengthening BUMDes is carried out through four main strategies: downstreaming of superior commodities, institutional incubation of BUMDes, village digitalization, and technical guidance to improve management capacity and the implementation of good governance. These strategies contribute to increasing institutional capacity, added value of village products, market access, and community economic independence. Thus, strengthening Advanced BUMDes is a strategic step in supporting sustainable village economic development in Lampung Province.

Keywords: BUMDes, PMDT Office, local economy, village development, community empowerment.

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung dalam penguatan BUMDes Maju untuk menggerakkan perekonomian lokal. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari dokumen, regulasi, dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PMDT berperan sebagai fasilitator dan regulator melalui Program BUMDes Maju yang terintegrasi. Penguatan BUMDes dilakukan melalui empat strategi utama, yaitu hilirisasi komoditas unggulan, inkubasi kelembagaan BUMDes, digitalisasi desa, dan bimbingan teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas pengelola serta penerapan tata kelola yang baik. Strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, nilai tambah produk desa, akses pasar, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penguatan BUMDes Maju menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kata kunci: BUMDes, Dinas PMDT, perekonomian lokal, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN [INTRODUCTION]

Desa merupakan subyek dalam pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai tonggak utama pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan serta penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal (Mutolib et al., 2019; Ridzal & Hasan, 2020). Dalam kerangka tersebut, Badan Usaha Milik Desa hadir sebagai instrumen vital yang didorong untuk mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, sumber daya alam, dan manusia guna mencapai kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan (Moita, 2022; Rahmaniah et al., 2024). Sebagai pilar ekonomi, lembaga ini secara strategis mengintegrasikan pengelolaan potensi lokal dengan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa serta menjadi instrumen efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat perdesaan. Dengan adanya regulasi ini, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta membuka lapangan kerja baru, yang secara bertahap berkontribusi pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Ferrer et al. (2026) menyatakan bahwa penguatan lembaga ekonomi lokal memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup pemahaman regulasi, penataan administrasi, pencatatan keuangan, dan pemetaan potensi usaha. Temuan ini relevan dengan penguatan BUMDes karena keberhasilan lembaga ekonomi desa tidak hanya ditentukan oleh legalitas kelembagaan, tetapi juga oleh kapasitas pengelolaan, akuntabilitas, dan kemampuan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal.

Lebih jauh lagi, melalui pengelolaan unit usaha berbasis potensi lokal, BUMDes berfungsi sebagai katalisator yang mampu mengubah kondisi ekonomi yang stagnan menjadi lebih produktif serta inklusif bagi seluruh lapisan warga (Nursetiawan et al., 2024). Implementasi BUMDes secara optimal tidak hanya memperkuat sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pemanfaatan aset desa, tetapi juga memberikan solusi strategis dalam membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, BUMDes berperan signifikan dalam mengoptimalkan sumber daya desa yang sebelumnya belum tergarap secara maksimal untuk mendorong kreativitas dan kemandirian ekonomi desa (Enggraini et al., 2020; Iskandar et al., 2021). Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peranan krusial sebagai regulator dan fasilitator melalui penyediaan dukungan kebijakan serta penguatan kapasitas kelembagaan agar BUMDes dapat beroperasi secara profesional dan berkelanjutan (Pradani, 2020).

Pemerintah daerah mengorkestrasi berbagai program pemberdayaan untuk memastikan BUMDes bertransformasi menjadi unit usaha yang mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana desa oleh pemerintah pusat (Diartho, 2017). Pemerintah daerah, dalam membangun BUMDes, memiliki kapasitas untuk melakukan penguatan kelembagaan masyarakat untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan, yang secara konteks non-anggaran peran ini juga dibutuhkan oleh BUMDes. Dalam konteks lokal, Provinsi Lampung memandatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi (Dinas PMDT) sebagai corong utama penguatan BUMDes. Lembaga ini bertugas membangun BUMDes dengan memberikan modal sosial kepada kelompok masyarakat agar lebih produktif (Zubaedi 2016).

Provinsi Lampung dipilih dalam penelitian ini karena berdasarkan data pemerintah setempat telah memiliki 2.446 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 13 kabupaten se-Provinsi Lampung. Jumlah BUMDes itu sama dengan jumlah desa di Provinsi Lampung. Dengan jumlah ini, peran pemerintah daerah perlu didorong untuk lebih

optimal agar dapat menjangkau optimalnya seluruh BUMDes. Selain itu, didapatkan berdasarkan pemantauan awalan secara pra-riset, pemberdayaan BUMDes di Provinsi Lampung dihadirkan secara *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Konsep *people centered* sebagai pembangunan berorientasi masyarakat, konsep *participatory* berarti pembangunan dengan melibatkan partisipasi warga, sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan berorientasi pemberdayaan masyarakat yang bersifat berkelanjutan (Suharto 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Dan Transmigrasi Dalam Penguatan Bumdes Maju Untuk Menggerakkan Perekonomian Lokal Di Provinsi Lampung.

METODE [METHODE]

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung dalam penguatan BUMDes Maju untuk menggerakkan perekonomian lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena, kebijakan, serta strategi yang diterapkan dalam pengembangan BUMDes di Provinsi Lampung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program BUMDes Maju, yaitu dengan Kepala Bidang 3 Pengembangan Perekonomian Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMDT Provinsi Lampung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan regulasi yang relevan, dokumen perencanaan daerah, laporan program, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan BUMDes dan pembangunan ekonomi desa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi bentuk peran Dinas PMDT dalam penguatan BUMDes Maju, sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian lokal di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN [RESULTS AND DISCUSSION]

Program BUMDes Maju yang diintegrasikan ke dalam program unggulan Gubernur Lampung, "Desaku Maju", pada tahun 2025, merupakan manifestasi dari strategi pembangunan ekonomi berbasis perdesaan (*rural-based economic development*). Dinas PMDT Provinsi Lampung memegang peran sentral sebagai fasilitator dan regulator melalui mekanisme Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Pendekatan PHTC ini secara ilmiah mencerminkan penerapan manajemen strategis sektor publik yang berorientasi pada hasil cepat, terukur, dan berdampak luas (*high-impact, fast-tracked initiatives*). Dalam konteks penguatan ekonomi lokal (*local economic development*), intervensi Dinas PMDT difokuskan pada transformasi BUMDes dari entitas sosial menjadi entitas bisnis yang mandiri, berdaya saing, dan akuntabel. Dinas PMDT mengonstruksikan akselerasi ekonomi ini melalui empat pilar intervensi strategis:

1. Hilirisasi Komoditas: Konstruksi Rantai Nilai (Value Chain) Pertanian Unggulan

Hilirisasi komoditas merupakan salah satu pilar intervensi strategis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung dalam memperkuat BUMDes Maju sebagai penggerak perekonomian lokal. Kebijakan ini didasarkan pada potensi sumber daya pertanian yang sangat besar di Provinsi Lampung, khususnya komoditas singkong (ubi kayu), jagung, dan padi yang menjadi sektor unggulan

daerah. Melalui pendekatan hilirisasi, Dinas PMDT berupaya mendorong desa agar tidak hanya berperan sebagai penghasil bahan baku, tetapi juga mampu mengelola, mengolah, dan memasarkan produk sehingga memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi.

Strategi ini menjadi sangat relevan mengingat Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah agraris terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Provinsi Lampung secara konsisten menjadi produsen singkong terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 39% hingga 47% terhadap total produksi singkong nasional setiap tahunnya. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa singkong merupakan komoditas unggulan yang memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa. Namun, selama ini sebagian besar hasil produksi masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh petani dan masyarakat desa relatif rendah. Akibatnya, sebagian keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pelaku industri pengolahan di luar desa.

Melihat kondisi tersebut, Dinas PMDT melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan mendorong keterlibatan BUMDes dalam kegiatan hilirisasi komoditas. BUMDes didorong untuk bekerja sama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam mengelola rantai pascapanen, mulai dari proses pengeringan menggunakan vertical dryer, penggilingan, pengemasan, hingga pemasaran produk. Melalui mekanisme ini, komoditas yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, seperti singkong menjadi tepung tapioka atau modified cassava flour (mocaf), gabah menjadi beras premium kemasan, serta jagung menjadi bahan baku pakan ternak. Peran BUMDes dalam proses hilirisasi tersebut menunjukkan adanya transformasi fungsi BUMDes dari sekadar lembaga usaha desa menjadi lembaga ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan terlibat langsung dalam proses pengolahan, keuntungan yang sebelumnya dinikmati oleh pihak luar dapat dipertahankan dan berputar di dalam desa. Selain meningkatkan pendapatan BUMDes, strategi ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja baru, dan penguatan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Lebih lanjut, hilirisasi yang dilakukan Dinas PMDT tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan, tetapi juga diarahkan pada penguatan akses pasar. Salah satu upaya yang saat ini sedang dikembangkan adalah pemberdayaan BUMDes sebagai pemasok (supplier) kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Strategi ini menjadi langkah penting karena keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk, tetapi juga oleh kemampuan menjamin pasar bagi produk tersebut. Dalam skema ini, BUMDes didorong untuk menjadi agregator dan pemasok berbagai kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh SPPG, seperti beras, telur, sayuran, ikan, jagung, maupun produk pangan lainnya yang berasal dari petani dan pelaku usaha desa. Melalui peran tersebut, BUMDes tidak hanya menghubungkan produsen lokal dengan konsumen, tetapi juga menciptakan rantai pasok yang lebih pendek dan efisien. Kehadiran pasar yang relatif stabil melalui program MBG memberikan peluang bagi BUMDes untuk meningkatkan volume usaha sekaligus memberikan kepastian pemasaran bagi hasil produksi masyarakat desa.

Apabila dilihat secara keseluruhan, strategi yang dilakukan Dinas PMDT menunjukkan bahwa penguatan BUMDes Maju dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada tahap hulu, Dinas PMDT mendorong peningkatan kapasitas produksi komoditas unggulan desa. Pada tahap tengah, BUMDes diperkuat untuk mengelola proses pengolahan dan menciptakan nilai tambah produk. Sementara pada tahap hilir, Dinas PMDT membuka akses pasar melalui kemitraan dan pengembangan peran BUMDes sebagai pemasok kebutuhan program MBG melalui SPPG. Pendekatan ini menjadikan BUMDes tidak hanya

sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengembangan rantai nilai komoditas lokal.

Dengan demikian, hilirisasi komoditas yang dilakukan oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung merupakan strategi penting dalam penguatan BUMDes Maju. Melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk, serta perluasan akses pasar melalui program MBG, BUMDes didorong untuk menjadi lembaga usaha yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

2. Inkubasi BUMDes: Restrukturisasi Kelembagaan dan Eskalasi Klasifikasi Status

Inkubasi BUMDes merupakan salah satu pilar intervensi strategis yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung dalam memperkuat BUMDes Maju sebagai penggerak perekonomian lokal. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) BUMDes agar mampu berkembang menjadi lembaga usaha desa yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Upaya ini dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan BUM Desa.

Dalam pelaksanaannya, Dinas PMDT menggunakan sistem pemeringkatan BUMDes sebagai instrumen untuk memetakan kondisi dan perkembangan BUMDes di Provinsi Lampung. Pemeringkatan tersebut terdiri atas kategori Perintis, Pemula, Berkembang, dan Maju. Melalui klasifikasi ini, pemerintah dapat mengetahui tingkat kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta kinerja usaha setiap BUMDes sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Berdasarkan kondisi empiris di Provinsi Lampung, sebagian besar BUMDes masih berada pada kategori Berkembang. Meskipun telah memiliki aktivitas usaha dan kelembagaan yang berjalan, banyak BUMDes yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengelolaan usaha yang belum profesional, keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan aset yang belum optimal, serta tata kelola yang masih bersifat part-time. Kondisi tersebut menyebabkan banyak BUMDes mengalami kesulitan untuk naik kelas menjadi BUMDes Maju yang memiliki daya saing lebih tinggi.

Melalui program inkubasi, Dinas PMDT berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan pendampingan dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan. Bentuk intervensi yang dilakukan antara lain melalui standarisasi tata kelola organisasi, penguatan manajemen usaha dan keuangan, fasilitasi legalitas badan hukum melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta restrukturisasi kelembagaan agar fungsi pengawasan dan fungsi operasional dapat berjalan secara profesional. Dalam konteks ini, kepala desa ditempatkan sebagai penasihat atau pengawas sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pengelolaan operasional usaha dilakukan oleh direktur dan pengurus BUMDes yang memiliki kompetensi di bidang usaha. Program inkubasi ini pada dasarnya bertujuan untuk mendorong BUMDes naik kelas dari kategori Berkembang menjadi kategori Maju. Status BUMDes Maju menunjukkan bahwa suatu BUMDes telah memiliki tata kelola yang baik, mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan, memiliki sumber permodalan yang relatif mandiri, mencatatkan keuntungan secara konsisten, serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BUMDes Maju juga diharapkan mampu menjalankan fungsi sosial melalui pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat desa.



Gambar 1. Matriks Perencanaan Berdasarkan Renstra 2025-2026

Komitmen Dinas PMDT dalam meningkatkan kualitas BUMDes tercermin dalam target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dari total 2.435 BUMDes yang ada di Provinsi Lampung, jumlah BUMDes Berkembang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 763 BUMDes. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan sebesar 3,07% dari total BUMDes yang ada atau sekitar 75 BUMDes. Dengan demikian, jumlah BUMDes Berkembang yang ditargetkan pada akhir tahun 2025 mencapai 838 BUMDes. Di sisi lain, peningkatan status BUMDes Maju juga menjadi fokus utama program inkubasi. Pada tahun 2024, jumlah BUMDes yang telah berstatus Maju tercatat sebanyak 40 BUMDes. Melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan, Dinas PMDT menargetkan peningkatan sebesar 0,61% dari total BUMDes atau sekitar 15 BUMDes pada tahun 2025. Dengan target tersebut, jumlah BUMDes Maju di Provinsi Lampung diharapkan meningkat menjadi 55 BUMDes pada akhir tahun 2025.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas PMDT mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.252.453.710 guna mendukung program peningkatan pemerinkatan BUMDes Berkembang dan BUMDes Maju. Alokasi anggaran ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kelembagaan BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi desa di Provinsi Lampung. Melalui dukungan pendanaan tersebut, berbagai kegiatan pembinaan, pendampingan, inkubasi usaha, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

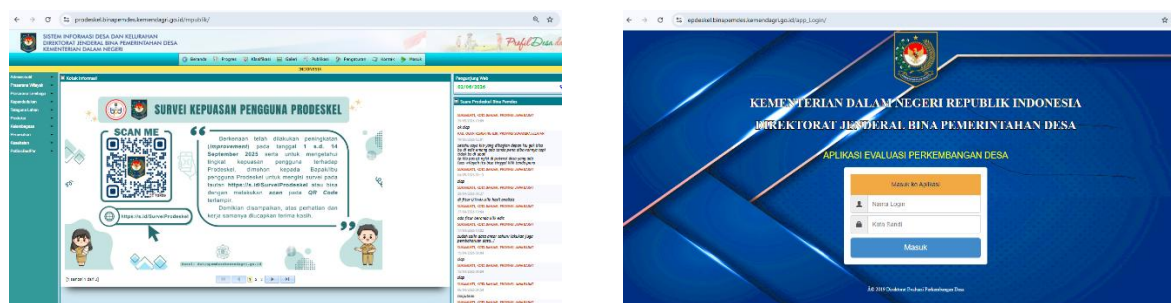
Apabila dikaitkan dengan tujuan penguatan perekonomian lokal, program inkubasi BUMDes memiliki peran yang sangat strategis. Semakin banyak BUMDes yang berhasil naik kelas menjadi BUMDes Berkembang dan BUMDes Maju, maka semakin besar pula kapasitas ekonomi desa yang dapat dikelola secara mandiri. BUMDes yang memiliki kelembagaan kuat dan usaha yang sehat akan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk desa, memperluas akses pasar, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan kata lain, keberhasilan program inkubasi tidak hanya diukur dari meningkatnya status pemerinkatan BUMDes, tetapi juga dari kemampuan BUMDes dalam menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.

Dengan demikian, inkubasi BUMDes yang dilakukan oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung dapat dipahami sebagai strategi peningkatan kapasitas kelembagaan yang bertujuan untuk mempercepat transformasi BUMDes menuju kategori Berkembang dan Maju. Melalui pemerinkatan, pendampingan, penguatan tata kelola, legalitas usaha, serta dukungan anggaran yang memadai, Dinas PMDT berupaya menciptakan BUMDes yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, peningkatan jumlah BUMDes Berkembang dan BUMDes Maju diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam menggerakkan perekonomian lokal dan mewujudkan desa yang mandiri serta sejahtera di Provinsi Lampung.

3. Digitalisasi Desa: Mengatasi Hambatan Spasial dan Akselerasi Efisiensi Distribusi

Digitalisasi desa merupakan salah satu pilar intervensi strategis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung dalam mendukung penguatan BUMDes Maju sebagai penggerak perekonomian lokal. Upaya ini dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan hambatan spasial, seperti luasnya wilayah, perbedaan karakteristik desa, serta keterbatasan akses informasi yang sering menghambat proses perencanaan, pembinaan, dan pengembangan usaha desa.

Dalam konteks penguatan BUMDes Maju, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan desa, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan Dinas PMDT memperoleh data yang lebih akurat, cepat, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan kebijakan. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat melakukan pemetaan potensi desa, mengidentifikasi peluang pengembangan usaha, serta menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMDes. Implementasi digitalisasi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan sistem Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel). Kedua platform ini menjadi instrumen pendukung yang membantu Dinas PMDT dalam memperoleh informasi mengenai kondisi desa, potensi ekonomi yang dimiliki, serta tingkat perkembangan desa secara menyeluruh. Data yang tersedia dalam sistem tersebut kemudian menjadi dasar dalam merancang strategi penguatan BUMDes Maju yang lebih tepat sasaran.



Gambar 2. Laman Situs Informasi Berbasis Web Prodeskel

Melalui Prodeskel, Dinas PMDT dapat melihat potensi sumber daya yang dimiliki setiap desa, baik dari aspek ekonomi, sumber daya alam, maupun kondisi sosial masyarakat. Informasi tersebut penting untuk menentukan sektor usaha yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh BUMDes. Dengan demikian, pengembangan unit usaha BUMDes tidak dilakukan secara umum, tetapi disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan riil yang dimiliki oleh desa. Sementara itu, Epdeskel memberikan gambaran mengenai tingkat perkembangan desa dan capaian pembangunan yang telah dilakukan. Informasi ini membantu Dinas PMDT dalam mengidentifikasi desa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut serta mengevaluasi efektivitas program penguatan BUMDes yang telah dijalankan. Dengan adanya data yang terukur, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes dapat segera ditindaklanjuti. Keberadaan Prodeskel dan Epdeskel pada dasarnya menjadi bagian dari strategi digitalisasi yang mendukung penguatan BUMDes Maju.

Melalui kedua sistem tersebut, Dinas PMDT dapat mempercepat distribusi informasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, sehingga proses pelaporan, koordinasi, pembinaan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efisien. Kondisi ini sangat penting mengingat keberhasilan BUMDes

tidak hanya ditentukan oleh pengelolaannya di tingkat desa, tetapi juga oleh kualitas pembinaan dan dukungan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah.

Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Dinas PMDT dapat menentukan prioritas program, menyesuaikan bentuk intervensi, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif berdasarkan informasi yang tersedia dalam sistem. Dengan demikian, program penguatan BUMDes Maju tidak lagi bersifat umum, tetapi lebih terarah sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing desa. Oleh karena itu, Prodeskel dan Epdeskel dapat dipahami sebagai instrumen digitalisasi yang digunakan Dinas PMDT untuk mendukung penguatan BUMDes Maju. Keberadaan kedua sistem tersebut membantu pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi desa, memantau perkembangan desa, mempercepat aliran informasi, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi program. Melalui pemanfaatan data yang lebih akurat dan terintegrasi, Dinas PMDT dapat mendorong BUMDes berkembang secara lebih optimal sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Lampung.

4. Bimbingan Teknis (Bimtek): Penegakan Good Corporate Governance (GCG)

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan salah satu pilar intervensi strategis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung dalam penguatan BUMDes Maju sebagai penggerak perekonomian lokal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes sekaligus memperkuat penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola usaha desa.



Gambar 3. Dokumentasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Bum Desa Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Phtc) Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2025.

Pelaksanaan Bimtek dilatarbelakangi oleh masih adanya berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes, seperti lemahnya kapasitas manajerial, rendahnya kualitas pengelolaan keuangan, kurang optimalnya perencanaan usaha, serta belum maksimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat perkembangan BUMDes dan mengurangi kontribusinya terhadap perekonomian desa. Oleh karena itu, Dinas PMDT memandang bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan BUMDes yang profesional dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDes dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025, Dinas PMDT memberikan berbagai materi yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan, tata kelola BUMDes, manajemen keuangan, inovasi usaha, digitalisasi, serta penyusunan laporan

keuangan BUMDes. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi terkait lainnya, sehingga materi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif sesuai kebutuhan pengelola BUMDes.

Jika dikaitkan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka Bimtek yang dilaksanakan oleh Dinas PMDT berperan dalam menanamkan lima prinsip utama tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Transparansi diwujudkan melalui peningkatan kemampuan pengurus BUMDes dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. Akuntabilitas diperkuat melalui pemahaman mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan dalam organisasi BUMDes. Responsibilitas ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman pengurus terhadap kewajiban dan fungsi BUMDes dalam memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Sementara itu, independensi dan kewajaran menjadi landasan dalam pengambilan keputusan usaha yang profesional dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu.

Dalam perspektif penguatan BUMDes Maju, Bimtek tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan yang digunakan Dinas PMDT untuk membangun tata kelola organisasi yang lebih sehat. BUMDes yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari pemerintah desa, masyarakat, maupun mitra usaha. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam memperluas usaha, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Efektivitas kegiatan Bimtek juga dapat dilihat dari hasil yang dicapai setelah pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan laporan kegiatan, terdapat peningkatan penyertaan modal pada BUMDes peserta pelatihan dari Rp90.129.500 pada tahun 2024 menjadi Rp5.030.080.198 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kepercayaan dan dukungan terhadap BUMDes sehingga unit usaha yang dijalankan menjadi lebih aktif dan produktif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas dan tata kelola yang diberikan melalui Bimtek mampu mendorong perkembangan kelembagaan dan usaha BUMDes secara nyata.

Dengan demikian, Bimbingan Teknis (Bimtek) dapat dipahami sebagai instrumen strategis Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam menegakkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDes Maju. Melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas tata kelola, serta pembinaan manajemen usaha dan keuangan, Dinas PMDT berupaya menciptakan BUMDes yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing. Pada akhirnya, penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan BUMDes dalam menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Lampung.

KESIMPULAN [CONCLUSION]

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam penguatan BUMDes Maju sebagai upaya menggerakkan perekonomian lokal. Peran tersebut diwujudkan melalui fungsi fasilitator dan regulator dalam Program BUMDes Maju yang terintegrasi dengan program Desaku Maju. Penguatan BUMDes dilakukan melalui empat strategi utama, yaitu hilirisasi komoditas unggulan desa, inkubasi kelembagaan BUMDes, digitalisasi desa melalui pemanfaatan Prodeskel dan Epdeskel, serta pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) untuk memperkuat kapasitas pengelola dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Implementasi keempat strategi tersebut mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes, menciptakan nilai tambah produk desa, memperluas akses pasar, serta memperkuat tata kelola organisasi yang lebih profesional dan akuntabel. Dengan demikian, penguatan BUMDes Maju tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi desa, tetapi juga

berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA [REFERENCES]

- Diarto, H. C. (2017). Strategi Terhadap Pengembangan Kelembagaan BUMDESA di Kabupaten Jember. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17, 200–218. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1801>
- Dinastph.lampungprov.go.id. 2023. Provinsi Lampung Memproduksi Ubi Kayu 6.719.088 Ton merupakan peringkat 1 Nasional. Diakses pada 6 Juni 2026, melalui <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/provinsi-lampung-memproduksi-ubi-kayu-6-719-088-ton-merupakan-peringkat-1-nasional>.
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Pongok-Polanharjo, Klaten. *Matra Pembaruan*, 4, 71–82. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>
- Fay, D. L. 2020. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ferrer, V. S., Triatmojo, F., Puspawati, A. A., Munawaroh, K., Caturiani, S. I., & Wardianto, K. B. (2026). Penguatan Pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Edukasi Kebijakan, Keuangan, dan Peluang Usaha di Kelurahan Kupang Kota, Bandar Lampung. *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6, 9–16. <https://doi.org/10.23960/seandanan.v6i1.78>
- Hawa, S., Sokarina, A., & Suryantara, A. B. (2022). Peran Bumdes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 235-243. https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/app_Login/
<https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19, 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Karyana, Y. (2023). Inovasi pemberdayaan BUMDes sebagai simpul penggerak ekonomi masyarakat desa. *Populika*, 11(1), 41-49.
- Moita, S. (2022). Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Karakter dan Potensi Masyarakat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Abdidas*, 3, 959–966. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i6.703>
- Mutolib, A., Nikmatullah, D., & Effendi, I. (2019). Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3, 10–19. <https://doi.org/10.32487/jshp.v3i1.535>
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Prabowo, F. H. E., & Sobari, M. (2024). Pelatihan Manajemen BUMDes Berbasis Sosiokultural Masyarakat Lokal di Desa Sukamaju. *Warta LPM*, 21–32. <https://doi.org/10.23917/warta.v27i1.2863>

- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan BUM Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Pradani, R. F. E. (2020). PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERBASIS POTENSI LOKAL SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA. *Journal of Economics and Policy Studies*, 1, 23–33. <https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3429>
- Rahmaniah, S. E., Musa, D. T., Alamri, A. R., Marini, M., & Sari, D. (2024). Penguatan Pendidikan dan Literasi Politik Dikalangan Muda. *Lumbang Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9, 133–143. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i1.1565>
- Ridzal, N. A., & Hasan, W. A. (2020). EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 4, 98–106. <https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.575>